LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN APRIL DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Jumat, 10 Mei 2024

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kepala Sub Bagian
4. Sub Koordinator
5. Bendahara Pembantu
6. Bendahara Pelaksana Pembantu
7. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
8. Pelaksanan pada masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 29,58 %

b. Keuangan = 6.414.984.588 (28,67%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.320.000			13.322.000		
1	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	67.320.000	33,46	19,79	13.322.000	(13,67)	menyesuaikan kebutuhan (tamu)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	36.200.000			400.000		
1	Pelayanan Informasi	36.200.000	3,60	0,80	400.000	(2,80)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.800.000			5.443.000		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.800.000	18,73	5,99	5.443.000	(12,74)	Sesuai kebutuhan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	15.400.000			0		
1	Workshop Tim Teknis PUG	15.400.000	61,04	0	0	(61,04)	dilaksanakan bulan Mei
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	72.990.000			12.512.000		
1	Roadshow PUG bagi OPD Provinsi	28.670.000	76,89	60,68	8.570.000	(16,21)	Anggaran konsumsi belum terserap menggunakan

							anggaran masing-masing OPD. Beberapa OPD belum dapat dilaksanakan roadshow karena kegiatan masing-masing OPD yang padat di bulan Mei.
2	Konsultasi PUG	44.320.000	26,79	22,74	3.942.000	(4,05)	efisiensi perjalanan dinas
	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	16.320.000			0		
1	Sosialisasi Kebijakan dan pendampingan PUG kepada PSW/PSG	16.320.000	100	0	0	(100)	PSW/PSG masih banyak agenda di bulan April
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi							
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	431.735.000			53.971.440		
1	Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)	431.735.000	12,51	11	53.971.440	(1,51)	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	240.000			0		
1	Pelaporan Advokasi Implementasi GSIB dalam penurunan AKI AKB	240.000	100	0	0	(100)	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan diakhir bulan, pelaporan akan dilaksanakan dibulan Mei
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							
	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	48.240.000			6.850.000		
1	Koordinasi dan Pemantauan Capaian Pengembangan KLA	17.200.000	41,28	35,47	6.100.000	(5,81)	honor narsum sebagian akan digunakan dalam rakor GT KLA Provinsi
2	Fasilitasi dan Pendampingan Peningkatan Capaian Pengembangan KLA	31.040.000	100	2,42	750.000	(97,58)	jadwal yang diberikan oleh kabupaten yg akan mendapat pendampingan hampir seluruhnya beralih ke bulan mei, karena hari efektif di bulan april tidak banyak (libur lebaran)
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	51.000.000			4.200.000		
1	Pelaksanaan FGD Pembahasan Kebijakan Perlindungan Anak	51.000.000	10,20	8,24	4.200.000	(1,96)	pelaksanaan FGD Pembahasan Kebijakan membutuhkan satu narasumber per klaster KLA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	14.500.000			14.324.000		
1	Pelaksanaan Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus bagi AMPK	14.500.000	100	98,79	14.324.000	(1,21)	

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera							
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	58.844.000			29.145.940		
1	Sosialisasi Penurunan Angka Stunting Melalui Kelompok BKB	58.844.000	51,69	49,52	29.145.940	(2,17)	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	44.347.000			0		
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk dan Jaringan Usaha Kelompok UPPKA	44.347.000	6,88	0	0	(6,88)	Menyesuaikan kebutuhan
	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	15	0	0			
	Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	0	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

-

Upaya

-

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Pendampingan & fasilitasi KLA 6 Kabupaten
2. Ngopi Penak
3. Sosialisasi pengembangan program ketahanan keluarga melalui kelompok kegiatan di kampung keluarga berkualitas
4. Workshop peningkatan kaapsitas kelembagaan dan usaha kelompok uppka
5. Penggerakan pelayanan KB dalam rangka Harlah Aisyiyah
6. Penggerakan pelayanan KB dalam rangka HUT IBI
7. Rakor pencegahan kekerasan terhadap anak
8. FGD pembahasan kebijakan perlindungan anak

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian

1. Masing-masing pimpinan pada unit kerja memantau indikator kinerja serta realisasi keuangan/fisiknya
2. ApabilaÂ target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan April 2024, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Jumat, 10 Mei 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM

NIP. 196811241993102001